

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

WARTA



ISSN 2086-1975



9 772088 197569

#edisi 1.2020

WIRANTO

Melihat yang Tak Terlihat

TAHIR

Komitmen Pengentasan Kemiskinan

M. LUTHFI ALI YAHYA

Sikap Bela Bangsa dan Bela Negara

WARTA WANTIMPRES

Warta WANTIMPRES adalah media publikasi periodik yang bertujuan untuk menyampaikan profil dan kegiatan Wantimpres kepada publik secara berkala.

Penanggung Jawab
Agus Widodo

Pimpinan Redaksi
M. Arfan Sahib Sali K.

Editor
M. Faried
Fikroh Amali F. A.

Penyusun
Aprilliana
Endah Wahyuni
B. Bonnik Manoe
Andhi Ilham P.
Agung Darmawan
Dian Kartika Putri
Ria Andayani
Syahlarriyadi
D. Herdiyan

www.wantimpres.go.id

DAFTAR ISI

FOKUS

02 Wiranto

PERSPEKTIF

04 Arifin Panigoro

06 Tahir

08 M. Luthfi Ali Yahya

10 M. Mardiono

12 Putri Kus Wisnu Wardani

14 R. Agung Laksono

16 Sidarto Danusubroto

18 Soekarwo

20 Wiranto

GALERI KEGIATAN

22 Galeri Kegiatan

Alamat Redaksi :

Jalan Veteran III No 2 Jakarta 10110
Telp : (021) 3444801
Faks: (021) 3865092
Email: arfan.ssk@setneg.go.id



Hak Cipta dilindungi Undang - Undang.
Dipersilahkan mengutip atau memperbanyak sebagian majalah ini dengan seizin tertulis dari penulis dan/ atau penerbit.

Foto Cover :



Nelayan di Larantuka
© Jurnasyanto Sukarno

Sawah di Ubud, Bali (back cover)
© wallbg.com/free license

FOKUS



WIRANTO
Ketua Wantimpres

"Membangun Kebersamaan,
Toleransi dan Persatuan"

PERSPEKTIF



ARIFIN PANIGORO

Tantangan Kesehatan dan Energi



TAHIR

Komitmen Pengentasan Kemiskinan



M. LUTHFI ALI YAHYA

Sikap Bela Negara dan Bela Bangsa



M. MARDIONO

Pembangunan Logistik dan Birokrasi 4.0



PUTRI KUS WISNU W.

Pembangunan Kewirausahaan Indonesia



R. AGUNG LAKSONO

Prioritas untuk Kesejahteraan Rakyat



SIDARTO DANUSUBROTO

Menjaga Pancasila dan Kebhinekaan



SOEKARWO

Membangun dengan Akar Budaya



WIRANTO

Melihat yang Tak Terlihat



FOKUS

Wiranto

Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

MEMBANGUN KEBERSAMAAN, TOLERANSI DAN PERSATUAN

"Wantimpres memiliki posisi strategis dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden"

Wantimpres memiliki posisi strategis dalam memberikan nasihat dan pertimbangan (Nastim) kepada Presiden. Dengan posisi tersebut, Wantimpres harus bisa memahami tugas Presiden baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, termasuk memahami berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil, terutama apa yang menjadi mimpi dan harapan Presiden dalam memimpin Indonesia.

Wantimpres akan lebih banyak melihat, mendengar, dan memahami berbagai situasi dan kondisi lingkungan strategis, serta melakukan pendalaman terhadap program-program kerja pemerintah dan pelaksanaannya. Pemahaman atas mimpi dan harapan Presiden serta situasi dan kondisi akan menghasilkan nastim yang berkualitas.

Dalam 100 hari kerja, Wantimpres berfokus pada penyusunan tata kerja internal, dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, maupun Kepala Staf Presiden. Selain itu, untuk membawa suasana milenial seperti yang dilakukan Presiden.

Wantimpres menunjuk figur-figur milenial sebagai tim pendukung (*smart team*) sesuai dengan bidang penugasan, politik dan hukum, ekonomi, kesra, serta pertahanan dan keamanan. Tak kalah pentingnya, Wantimpres juga akan didukung dengan *smart room* sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan data dan informasi yang cepat dan tepat.

Lebih lanjut, dalam perjalanan 100 hari kerja ini, Wantimpres telah menyampaikan laporan secara langsung kepada Presiden. Presiden meminta untuk selanjutnya Wantimpres dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam pertemuan langsung secara berkala setiap bulannya.

Wantimpres juga telah melakukan kunjungan-kunjungan dan menjalin komunikasi dengan berbagai elemen, mulai dari media, akademisi hingga masyarakat. Kemudian, untuk melengkapi masukan agar lebih komprehensif, Wantimpres pun telah mengundang para pakar dari berbagai bidang.

Menyikapi situasi yang berkembang saat ini, Wiranto berpesan Indonesia tetap membutuhkan persatuan kalau ingin berhasil membangun bangsa dan negerinya. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dahulu para pejuang berani mengambil risiko kehilangan nyawa untuk melawan penjajah, maka kini, Bangsa Indonesia seharusnya malu jika tidak bisa mengisi kemerdekaan dan mencapai cita-cita.

Tugas generasi penerus untuk membangun dengan semangat kebersamaan, toleransi, dan persatuan. "Musuh yang sebenarnya bukan orang luar, tetapi diri kita sendiri, bahkan terkadang kita tidak bersatu sebagai bangsa. Oleh karena itu, pesan saya, modalitas untuk menang dalam persaingan global yang ketat ini, adalah kebersamaan, toleransi dan persatuan." ujar beliau. (DKP/MEL)

foto: Istimewa

TANTANGAN KESEHATAN DAN ENERGI

“Walaupun saat ini perhatian dunia tertuju pada penanganan pandemi Covid-19, namun bahwa fakta TBC mematikan lebih dari 300 orang Indonesia dan 1600 orang di dunia dalam sehari juga perlu mendapatkan concern dari semua pihak.”

Arifin Panigoro lahir di Bandung, 14 Maret 1945 dari pasangan Jusuf Panigoro dan Soehana. Ayahnya Jusuf Panigoro yang beretnis Gorontalo memutuskan merantau ke Bandung untuk berdagang kopiah di Jalan Braga setelah masa peperangan.

Selepas lulus dari Institut Teknologi Bandung, Jurusan Teknik Elektro, tahun 1973, Arifin mendirikan PT Meta Epsi Engineering yang bergerak di bidang kontraktor instalasi listrik *door to door*. Awal 1980-an beliau mendirikan PT Epsi Pribumi Drilling Company (Medco), yang bergerak di jasa pengeboran minyak dan gas, sebagai pijakan dalam membangun PT Medco Energi Internasional Tbk.

Dalam membangun bisnis, tentu tidak selalu berjalan mulus, ketekunan, inovasi, kejujuran, jejaring, intuisi bisnis, tanggung jawab serta kerja keras, selalu menjadi pegangan dalam menjalankan kegiatan dan tugas yang telah dipercayakan. Hingga dipercaya mengemban posisi puncak pada organisasi-organisasi strategis di luar bisnisnya, salah satunya menjadi Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia.

Pengenalan dan ketertarikan pada TBC berawal dari sang istri, Rasis Arifin Panigoro, yang terlebih dahulu aktif sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI). Suatu hari Rasis Arifin hadir dalam pertemuan terkait TBC di Seoul, Korea Selatan. Sepulangnya

dari pertemuan, sang istri menceritakan mengenai penguatan organisasi TBC di Korea Selatan dengan menunjuk “pensiunan” eksekutif perusahaan besar, yang berdampak positif bagi upaya pengentasan TBC di sana.

Fakta TBC telah membunuh setidaknya 300 orang Indonesia dan lebih dari 1.600 orang setiap harinya di dunia, jauh lebih tinggi daripada korban meninggal akibat COVID-19, tentu tanpa mendiskreditkan bahaya COVID-19. Untuk itu, semua pihak harus memiliki *concern* perihal ini.

Presiden telah memberikan tanggapan positif mengenai hal tersebut, hingga akhirnya hadir dan membuka kegiatan “Pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030” di Cimahi, Januari 2020.

Kini, Arifin Panigoro ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu dari sembilan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau menuturkan, Wantimpres ada untuk mendukung Presiden dengan memberikan nasihat dan pertimbangan (Nastim) baik dalam ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan, tentu dengan sudut pandang berbeda dari kementerian teknis.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres memerlukan data dan informasi yang komprehensif, sehingga Nastim yang disampaikan dapat memotret permasalahan lebih lengkap. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Untuk itu, Wantimpres dibantu oleh Sekretaris Anggota, Sekretariat serta tim ahli.

Sebagai Anggota Wantimpres, Arifin berharap kedepannya Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih positif. (ARD).

foto : Dok. Pribadi



Arifin Panigoro
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

**Tahir**

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

KOMITMEN PENGENTASAN KEMISKINAN

"Seorang negarawan harus berpikir dan bertindak untuk memberikan nilai tambah bagi negaranya"

Tahir (terlahir Ang Tjoen Ming) lahir di Surabaya, 26 Maret 1952 dari lingkungan warga kurang mampu dan dibesarkan oleh orangtua yang menghidupi keluarga dengan membuat becak. Setamat SMA ia bercita-cita menjadi dokter tapi harus kandas karena ayahnya sakit keras hingga Tahir harus mengambil alih bisnis keluarga. Namun demikian, Tahir berhasil mendapatkan beasiswa di NTU Singapura, menyelesaikan master di Golden Gates University, California, dan pada Agustus 2019 berhasil memperoleh gelar doktor di bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan dari UGM. Sumbangsihnya pada dunia pendidikan membawanya menjadi Majelis Wali Amanat di UC Berkeley dan UGM. Ia juga menerima gelar profesor dari Sun Yat-Sen University, Chancellor's Citation UC Berkeley, penghargaan Lee Kuan Yew dan 6 gelar doktor honoris causa.

Tahir memegang teguh pandangannya bahwa hidup adalah sarana menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Saat krisis ekonomi tahun 1998, banyak bank pemerintah maupun swasta yang ambruk, akan tetapi Bank Mayapada yang fokus pada pengucuran kredit usaha kecil tetap bertahan bahkan masuk ke pasar saham Bursa Efek Jakarta. Kesuksesan itu memacunya untuk membuka RS Mayapada yang memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi anak dan orang tidak mampu. Bisnisnya kemudian merambah toko bebas bea, perusahaan media, dan perusahaan properti yang berlokasi di Indonesia dan Singapura. Kiprahnya sebagai filantropis yang dikenal dunia adalah donasi senilai US\$ 75 juta kepada The Global Fund untuk melawan TBC, HIV, dan Malaria di Indonesia, bermitra dengan Bill & Melinda Gates Foundation.

Pada Mei 2010, Tahir dianugerahi gelar Dato' Sri dari Sultan Pahang, Malaysia, atas kontribusinya kepada masyarakat dan penyelesaian konflik antar perusahaan.

Tahir merupakan Utusan Khusus Presiden bidang investasi pada periode pertama Kabinet Kerja. Setelah ditunjuk sebagai Anggota Wantimpres pada bulan Desember 2019 dengan amanah khusus mengenai pengentasan kemiskinan, ia berkomitmen untuk tidak mengambil fasilitas negara. Tahir menyampaikan Wantimpres harus fokus pada lima prioritas kerja pemerintahan sesuai visi misi Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyerderhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi, tidak meluas atau terjebak dengan isu yang berkembang. Tahir menyatakan akan turun langsung dalam pengentasan kemiskinan dengan fokus pada 100 desa termiskin yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Rencananya ia akan membantu perbaikan tempat ibadah dan sekolah, pengadaan air bersih, dan bantuan berbasis mata pencaharian dan UMKM, misalnya bantuan alat pertanian untuk daerah petani, benih untuk daerah perkebunan, dan alat tangkap ikan untuk daerah nelayan. Tahir berharap di akhir masa jabatannya sebagai Anggota Wantimpres tidak ada lagi desa miskin di Indonesia.

Dalam pandangan Tahir seorang negarawan harus berpikir dan bertindak untuk memberikan nilai tambah bagi negaranya. "Semua manusia hidup untuk mencari nilai tambah. Kayu jika dibawa ke api hanya akan menjadi bahan bakar tetapi jika kayu tersebut diukir akan bernilai lebih, *you have to create value and sustainable*, negarawan seharusnya bertanya apa yang dapat diciptakan untuk negara ini, apa nilai tambah yang bisa diberikan" pungkasnya. (APR)

foto : B. Bonnik Manoe

SIKAP BELA NEGARA DAN BELA BANGSA

“Perjuangan para pendiri bangsa harus dihargai dengan cara tetap merawat NKRI”

Habib Luthfi lahir dari pasangan Habib Ali Hasyim dan Syarifah Nur pada tanggal 10 November 1947 di Pekalongan. Ayahanda beliau adalah seorang Tata Usaha (TU) Karesidenan Pekalongan yang menguasai 8 bahasa asing. Namun, dalam mendidik putra-putrinya beliau justru menggunakan bahasa daerah (Jawa halus) karena adanya kekhawatiran akan hilangnya bahasa daerah ini. Beliau seorang pecinta Qur'an (habibul Qur'an), sekaligus putra seorang ulama besar yang berjuang di Pekalongan khususnya dalam mendirikan pesantren dan pendidikan madrasah diniyah dan samailul huda. Alumni dari Madrasah Ali Hasyim tersebut minimal mampu berbicara dalam 2 (dua) bahasa asing.

Dalam mengajarkan agama, termasuk mendidik putra-putrinya, ayahandanya selalu mengajarkan nilai universalitas dari agama, tidak dogmatik, sehingga kelak para anak didiknya menjadi ulama-ulama besar yang moderat.

Ayahanda beliau dikenal sangat jenius karena kepiawaiannya dalam menguasai bahasa asing sekaligus mengajarkannya. Oleh karenanya waktu beliau tersita habis selain untuk keluarga, berkhidmat pada dunia pendidikan, dan tentu saja lebih luas lagi bagi bangsa dan negara. Hampir setiap hari beliau pulang ke rumah menjelang subuh dan tidak banyak orang yang mengetahui persis kesibukan beliau di luar sana. Habib Ali wafat dalam usia yang relatif masih belia yaitu 41 tahun. Sebelum wafatnya beliau berwasiat agar Habib Luthfi kecil meneruskan pendidikan di pesantren almamater ayahandanya yaitu

di Benda Kerep, Cirebon guna mengambil tabaruk (berkah). Disinilah beliau dibimbing oleh 3 orang guru/ulama tarekat yaitu Kyai Kaukab, Kyai Muhtadi dan Kyai Arsyad.

Setelah itu, Habib Luthfi muda melanjutkan ke pondok pesantren At - Tahuhidiyah Giren Talang, Tegal, berguru kepada Kyai Said bin Armia, Kyai Mansyur Kalimati, Letnan Abdullah Bin Umar Al Hadad, Musroh, dan Kyai Bajuri Sudimampir yang luar biasa ilmunya serta para guru lainnya di Tegal dan Indramayu.

Pada usia 14-15 tahun, Habib Luthfi diminta membantu pamannya di Madrasah Al Ma'arif desa Kliwed Kertasemayah, Indramayu. Sejarah mencatat, madrasah tersebut kemudian berkembang pesat. Jumlah murid yang awalnya hanya 26 orang menjadi 380 orang sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas. Habib Luthfi seolah diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk mengatasi seluruh problematika yang dihadapi oleh madrasah.

Dari perjalanan hidupnya itulah Habib Luthfi merasa terpanggil untuk ikut memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Sejak tahun 2000, beliau telah mengkampanyekan pentingnya meningkatkan kewaspadaan nasional. Cobaan dan ujian yang dialami negara ini tidaklah ringan. Bangsa ini telah mengalami jatuh bangun. Oleh karenanya dalam berbagai kesempatan, baik sebagai Ketua Thoriqoh Nasional maupun internasional, Habib Luthfi selalu mengingatkan betapa perjuangan para pendiri bangsa harus dihargai dengan cara tetap merawat NKRI. Itulah salah satu alasan mengapa beliau berupaya untuk menegaskan sikap bela negara, bela bangsa dan merah putih melalui Wantimpres (MF).

foto : Istimewa



Muhammad Luthfi Ali Yahya

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden



Muhamad Mardiono
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

PEMBANGUNAN LOGISTIK DAN BIROKRASI 4.0

"Pelayanan pemerintah yang cepat dan sesuai dengan perkembangan teknologi, ditambah dengan birokrasi dan regulasi sederhana menjadi kebutuhan yang mesti dipenuhi"

JUMAT, 13 Desember 2019 merupakan momentum bersejarah bagi H. Muhamad Mardiono. Hari itu, ia bersama delapan tokoh lain diberi amanah, dilantik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Tim Warta berkesempatan mewawancarai Muhamad Mardiono di ruang kerjanya di Gedung Wantimpres. Pada kesempatan itu, Mardiono berbagi kisah, pengalaman serta pandangannya.

Pak Mar, demikian beliau disapa, memiliki latar belakang pengalaman sebagai *entrepreneur*. Ia juga matang di bidang sosial dan politik. Mardiono yang dilahirkan di Yogyakarta mengawali kariernya di sebuah perusahaan di Jakarta. Kemudian ia dipindahtugaskan ke Cilegon, Banten. Di ujung barat Pulau Jawa sana-lah, Pak Mar mulai merintis usaha. Selama 37 tahun kiprahnya di dunia usaha dilalui dengan suka duka. Kesuksesan bisnisnya adalah buah kerja kerasnya. Perusahaannya bergerak di bidang industri, logistik, transportasi, perhotelan, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Melalui aktivitas usaha, banyak hal yang bisa ia perbuat. Selain untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, juga untuk orang lain. Terbukti perusahaan Pak Mar telah membuka lapangan kerja dengan karyawan sampai ribuan orang.

Bakat bisnis Mardiono sudah ada sejak kecil. Ia membantu ibunya berdagang. Sebelum menggeluti usaha, Mardiono ingin menjadi jenderal, namun cita-cita kandas di tengah jalan. "Hidup Saya sejak kecil memang penuh dengan perjuangan dan kerja keras, namun hal itu bukan penghalang

bagi saya untuk bangkit dan menghantarkan saya pada kehidupan saat ini," kata Mardiono memotivasi.

Pak Mar juga aktif di beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Di organisasi profesi, ia pernah menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten. Di partai politik, Pak Mar mengawali karier dari tingkat cabang sebagai dewan penasihat, kemudian bendahara wilayah, ketua wilayah, hingga akhirnya menjadi pimpinan di tingkat pusat, yakni sebagai wakil ketua umum. Di partainya, Mardiono juga didapuk menjadi ketua badan pemenangan pemilu nasional.

Selain isu ekonomi, Mardiono juga mempunyai perhatian terhadap birokrasi pemerintahan. Menurutnya di era revolusi digital disertai dengan bonus demografi saat ini, pelayanan pemerintah yang cepat dan sesuai dengan perkembangan teknologi, ditambah dengan birokrasi dan regulasi sederhana menjadi kebutuhan yang mesti dipenuhi. "Generasi milenial yang akan berperan, dan ke depan mereka diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan," tuturnya.

Kini sebagai Anggota Wantimpres, Mardiono akan memberikan pengabdian kepada semua golongan. "Pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan harapan rakyat Indonesia untuk bangkit, maju dan berkembang. Semoga keberadaan Saya sebagai Anggota Wantimpres menjadi kesempatan untuk mengabdikan pengetahuan dan pengalaman guna memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia," tegas Mardiono menutup wawancara. (RPH/TAS)

foto : Oktaviyani

PEMBANGUNAN KEWIRAUSAHAAN INDONESIA

“Pentingnya pembangunan kewirausahaan di Indonesia agar dapat menjadi penopang ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia 2045”

Putri Kus Wisnu Wardani adalah satu-satunya perempuan dalam susunan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik oleh Presiden Jokowi untuk periode 2019 – 2024. Lulusan *Master of Business Administration*, National University Inglewood, California, USA yang dikenal sebagai Komisaris Utama PT Mustika Ratu, Tbk., memiliki peran sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya sejak Januari 2013. Kiprah Putri yang sangat populer di dunia bisnis ini juga dikenal sebagai Sekretaris Komite Ekonomi dan Industri Nasional/KEIN pada tahun 2016 dan Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) periode 2018-2023. Selain itu, Putri adalah wanita pejuang eksistensi industri nasional dan pasar tradisional yang juga berperan aktif selaku Dewan Pembina Yayasan Pedagang Nusantara sejak tahun 2009 dan Ketua Umum Asosiasi Merek Indonesia (AMIN) pada 2011.

Latar belakang Putri yang cukup menonjol dalam sektor usaha memperkuat pengalaman dan menjadi bagian yang memperkaya dalam mewujudkan visinya sebagai Anggota Wantimpres. Berbagai perbedaan latar belakang profesi Anggota Wantimpres juga telah menjadi sumber daya yang saling melengkapi menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas Wantimpres. Harapan Putri sebagai Anggota Wantimpres dan sesuai dengan UUD 45 adalah untuk menyejahterakan segenap rakyat Indonesia, memberikan perlindungan kepada semua orang, termasuk didalamnya adalah kebebasan beragama.

Di tengah berbagai kesibukannya, Putri menegaskan bahwa prioritas pekerjaan rumah Indonesia adalah bagaimana melakukan swasembada pangan dalam hal pertanian dan peternakan dengan berbasis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta koperasi. Hal ini seharusnya cocok untuk diterapkan di Indonesia, mengingat kondisi tanahnya yang luas dan subur. New Zealand dapat menjadi tempat yang baik untuk belajar mengingat negara dengan populasi yang minim namun mampu, tidak saja berswasembada daging dan susu, tetapi juga menjadi pemain No. 1 di dunia untuk produksi susu formula. Adapun perusahaan *Multi-National Corporation (MNC)* yang mengelola disana adalah berbentuk koperasi.

Seperti pemikiran Bung Hatta, bentuk koperasi ini dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan pemerataan bagi masyarakat dengan tata kelola yang dilakukan selayaknya sebuah korporasi besar dan mapan. Apabila hal tersebut ditangani dengan baik oleh sebuah koperasi, maka Indonesia diharapkan dapat membangun industri pangan yang lebih mandiri dan berdaulat.

Lebih lanjut, Putri menyampaikan betapa pentingnya pembangunan kewirausahaan di Indonesia agar dapat menjadi penopang ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia 2045. Di sisi lain, beliau juga sangat *concern* terhadap perkembangan *Omnibus Law* yang digagas oleh pemerintah dan sedang dibahas di legislatif. Adapun *Omnibus Law* yang tepat dan sesuai saat ini adalah penting di Indonesia untuk membangun ekosistem investasi dan reindustrialisasi yang baik, bukan saja secara lokal, namun juga pada tingkat kawasan. (EWH)

foto : B. Bonnik Manoe



Putri Kus Wisnu Wardani
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden



R. Agung Laksono
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

PRIORITAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

"Permasalahan di bidang kesejahteraan rakyat perlu menjadi prioritas karena menyangkut banyak aspek kehidupan yang mendasar"

Resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) pada 13 Desember 2019 yang lalu, Agung Laksono bukanlah nama baru yang berkecimpung dalam dunia pemerintahan dan perpolitikan nasional. Tak disangka, Agung yang dulunya adalah merupakan seorang lulusan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, dalam perjalanan waktu kemudian menjadi lebih dikenal sebagai seorang negarawan yang memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif.

Agung yang lahir di Semarang pada 23 Maret 1949, memiliki pengalaman berorganisasi yang cukup luas dan pernah menjadi pemegang pucuk pimpinan tertinggi di salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) tahun 2015-2016. Setelahnya, kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar tahun 2017 hingga saat ini.

Agung sudah banyak makan asam garam di dunia parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tahun 1982. Sempat duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999-2004, Agung kemudian diberi kepercayaan memegang amanah sebagai Ketua DPR RI pada tahun 2004-2009. Sedangkan di bidang pemerintahan, Agung pernah dipercaya oleh Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (1998-1999). Kemudian pada tahun 2009-2014, beliau dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memegang

jabatan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Dalam membantu tugas Presiden mewujudkan visinya, Agung sebagai Anggota Wantimpres akan berfokus untuk turut membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang selalu menjadi momok dari tahun ke tahun. Di mata Agung, Wantimpres merupakan perintah dari UUD yang diberi tugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan (Nastim) kepada Presiden tentang berbagai aspek kehidupan. Pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden tentunya tidak akan sama seperti yang disampaikan oleh para Menteri Presiden, sehingga Presiden mendapatkan masukan yang seimbang dalam menyempurnakan kebijakan-kebijakannya agar prosesnya menjadi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, Wantimpres tidak dapat hanya duduk saja di meja tetapi juga perlu melihat dan mengecek secara langsung di lapangan.

Ke depannya, Agung berpandangan bahwa permasalahan di bidang kesejahteraan rakyat perlu menjadi prioritas karena menyangkut banyak aspek kehidupan yang mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, agama, penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, pariwisata, lingkungan hidup, serta permasalahan sosial lainnya. "Permasalahan di bidang kesejahteraan rakyat tentu akan menempati porsi yang terbesar dalam pertimbangan yang disampaikan oleh Wantimpres kepada Presiden" ujarnya. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa sebaik-baiknya pemerintahan jika kesejahteraannya tidak baik tentu penilaian terhadap pemerintah akan menurun. (AD).

foto : Humas Kemensetneg

MENJAGA PANCASILA DAN KEBHINEKAAN

“Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang telah mencapai demokrasi substansial”

Merupakan suatu kehormatan menjadi ajudan terakhir Bapak Bangsa pada masa akhir jayanya (pasca supersemar), walaupun hal tersebut membawa konsekuensi bagi perjalanan karier saya. Setelah selesai Seskopol pada Februari 1970, saya mulai diinterogasi Tenning Polsat Mabes Polri. Interogasi sangat ketat pada tahun pertama pemeriksaan, tapi mulai berkurang pada masa-masa berikutnya. Semasa menjalani proses interogasi, saya mengira inilah akhir dari perjalanan karier saya di kepolisian. Namun atas desakan Bapak Widodo Budidarmo (Kapolda Metro Jaya) kepada Tenning Polsat, akhirnya setelah lebih kurang 4 tahun dalam status ‘karantina politik’, saya memperoleh clearance politik dari Mabes Polri pada akhir tahun 1973.

Saya tidak menyesal, bahkan saya bersyukur pernah mendampingi pendiri bangsa, dan pemerintah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan karier, walaupun cap orde lama dan bekas Ajudan Bung Karno tetap menempel. *No sacrifice is ever wasted*. Walaupun mengalami begitu banyak tantangan, namun saya masih diberikan Anugerah oleh Allah SWT untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. Saya menjadi Anggota DPR RI selama 3 periode dan menjadi Ketua MPR RI pada usia 78 tahun dengan segudang aktivitas untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan. Bahkan dalam usia yang dapat dikatakan tidak muda lagi, saat ini saya masih dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk kedua kalinya.

Saat ini Presiden Joko Widodo telah berhasil meninggalkan *legacy* dalam pembangunan infrastruktur fisik. Selain pembangunan fisik, dalam era pemerintahan ini juga

perlu adanya *legacy* dalam bidang non fisik yaitu *nation and character building*, mengingatkan kembali sejarah pendirian bangsa, bagaimana *founding fathers* melahirkan Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, dan NKRI. Secara spesifik bahwa peran kita dalam bidang non fisik adalah dengan melestarikan Pancasila, merawat kebhinekaan, pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan dan juga menjadikan bangsa yang menampilkan wajah toleran dan menghormati keberagaman. Sebagai Anggota Wantimpres, saya diharapkan mampu membantu Presiden dalam bidang ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden

Disisi lain, Indonesia juga perlu belajar dari negara-negara lain yang telah mencapai demokrasi substansial, seperti misalnya Selandia Baru, Skandinavia, Kanada, maupun negara-negara maju lainnya. Ekosistem politik di negara-negara tersebut lebih sehat karena tingginya nilai toleransi di antara warganya. Masyarakat di sana juga sudah ditanamkan perilaku berketuhanan sejak usia dini, seperti menghormati sesama, toleran, jujur, disiplin, taat hukum, memiliki budaya malu, dan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi. Seharusnya hijrah dimaknai hijrah dalam perilaku bukan hanya pada penampilan fisik.

Anggota Wantimpres dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengedepankan sikap kenegarawanan yang menjaga kewibawaan dan nama baik Kepala Negara. Semua sikap dan perilaku kita harus tetap berada dalam koridor sehingga tidak menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak tertentu yang ingin menyerang kita secara pribadi, pemerintah, maupun Presiden. Kita bekerja di lingkungan istana, maka apapun yang kita lakukan dan ucapkan senantiasa akan dihubungkan dengan Presiden.

foto : Humas Kemensetneg



Sidarto Danusubroto

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden



Soekarwo
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

MEMBANGUN DENGAN AKAR BUDAYA

"Hanya kebudayaan yang mampu membersihkan kekotoran politik. Jangan sampai Indonesia maju tetapi kehilangan akar kebudayaan"

Mengenakan kopiah hitam, kacamata, berkumis tebal dan wajah yang selalu tersenyum. Hangat dan ramah. Itulah kesan pertama Tim saat bertemu beliau. Pakde Karwo, barangkali orang lebih mengenal nama panggilan ini ketimbang nama aslinya Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum.

Pakde Karwo lahir dan besar di lingkungan pertanian desa. Kondisi desa puluhan tahun silam serba terbatas, jauh berbeda dengan desa sekarang yang serba canggih dan modern. Namun, keterbatasan inilah yang justru memicu Soekarwo cilik untuk menghargai waktu dan kesempatan, terutama kesempatan mengenyam pendidikan. Lulusan Doktor Hukum dari Universitas Diponegoro ini membuktikan bahwa anak petani juga bisa maju dan berkarya.

Sebelum menjabat sebagai Wantimpres, Pakde Karwo telah melalui lika-liku kehidupan dan perjalanan karier yang panjang. Pada tahun 2009, Pakde Karwo dipercaya untuk memimpin Provinsi Jawa Timur selama dua periode (2009-2019). Bukan tanpa alasan, warga Jatim begitu mengelukannya karena kedekatan beliau dengan warga. Prinsip beliau, gubernur itu melayani dan bukan dilayani. Di bawah kepemimpinannya, Jatim sukses tiga kali meraih penghargaan Parasamy Purnakarya Nugraha, menjadi provinsi dengan nilai tertinggi untuk KPI (*Key Performance Indicator*) di bidang Pembangunan dan Pemerintahan.

Kini, sebagai anggota Wantimpres, Pakde Karwo ingin berkontribusi dalam pemikiran dan karya kepada rakyat, bangsa dan negara. Bukan hanya sekedar memberikan nasihat dan pertimbangan (*nastim*), tetapi *nastim* yang berbobot yang menjadi solusi permasalahan empirik.

Secara struktural, Wantimpres adalah pembantu Presiden. Maka, para pembantu ini harus dapat mensukseskan Presiden dalam menjalankan tugasnya, serta mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan Presiden dalam mewujudkan Visi dan Misi Indonesia.

Sebuah tantangan besar dari seorang Gubernur menjadi Wantimpres. Menurut beliau, Wantimpres mengabungkan antara konsep Presiden yang sudah dimatangkan melalui visi-misi RPJMN, tidak hanya akademik, namun juga *grounded* sehingga menjadi solusi sesuai permasalahan di lapangan. "Wantimpres tidak akan mengkritik konsep, tetapi perlu dicek di lapangan supaya tidak ada kegagalan implementasi. Kalau mau jadi pengkritik jangan jadi Wantimpres". Tantangan lainnya, Wantimpres perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama masukan dari rakyat. "Pekerjaan paling sulit adalah mendengarkan suara yang tidak terdengar. Orang miskin itu suaranya keras tapi kurang ada yang mendengar, lain dengan para *elite*".

Dengan luasnya bidang tugas Wantimpres, tentu menjadi peluang, perlunya Wantimpres didukung dengan infrastruktur yang memadai. Pakde Karwo optimis, dengan komposisi anggota Wantimpres saat ini akan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Beliau berkeyakinan di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan, Indonesia akan mampu mewujudkan harapannya, menyiapkan jalan terbaik melalui basis spiritual dan kebudayaan. "Hanya kebudayaan yang mampu membersihkan kekotoran politik. Jangan sampai Indonesia maju tetapi kehilangan akar kebudayaan." (MEL)

foto : Dok. Pribadi

MELIHAT YANG TAK TERLIHAT

“Bangsa Indonesia harus bersatu dan berdaulat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran”

Wiranto memiliki pengalaman hidup yang luar biasa, baik di bidang militer, dunia politik serta pemerintahan. Pengalaman di bidang militer dimulai ketika masuk Akademi Militer Nasional di tahun 1965. Kesempatan melakukan berbagai penugasan membuatnya memiliki berbagai pengalaman. Puncak karir militernya adalah saat ditunjuk menjadi Panglima ABRI. Jabatan ini membuatnya menjadi seorang komandan yang memimpin secara disiplin, tegas dan keras. Terlebih lagi, ketika itulah, Ia mendapat pengalaman luar biasa, yakni perpindahan dari rezim orde baru ke rezim reformasi.

Wiranto pernah mengikuti konvensi Partai Golkar di tahun 2004. Kemudian, di tahun 2009, Ia berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Cawapres dalam kompetisi Pilpres. “Politik mendominasi kehidupan nasional yang punya sistem demokrasi, dan mendapatkan monopoli untuk mengkader pemimpin” ucapnya ketika menyampaikan alasan mendirikan Partai Hanura di tahun 2006.

Pengalamannya di bidang pemerintahan dimulai saat menjadi panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan. Wiranto punya tips STMJ dalam menjalani amanah yang diemban. “S – sadar jabatan itu adalah karunia Allah dan kepercayaan rakyat. T – tahu tugasnya apa, masalah, dan cara menyelesaikan masalah itu. M – mau dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi. J – jujur kepada diri sendiri, organisasi, dan Tuhan” jawab Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menkopolkam pada masa kepemimpinan Presiden Gusdur dan Presiden Joko Widodo.

Sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto menyampaikan harus ada pemahaman mengenai pemikiran dan mimpi serta kebijakan Presiden. “Berbeda dengan pembantu Presiden yang secara teknis melaksanakan kebijakan Presiden, Wantimpres harus dapat melihat perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi pemerintah, serta bagaimana kebijakan dilaksanakan. Jadi, menyampaikan ide gagasan baru kepada Presiden. Melihat suatu hambatan, yang mungkin tidak terlihat. Mendengar suara rakyat yang tidak sampai ke Istana. Diharapkan Wantimpres akan punya nilai dan arti, dan bekerja dengan suatu keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan bermanfaat untuk Presiden”, ujar beliau.

Tantangan Wantimpres adalah bagaimana nastim yang diberikan kepada Presiden tidak duplikasi dengan instrumen lain yang dimiliki Presiden. Hal ini menjadi tantangan. Nasihat dan pertimbangan yang disampaikan harus mempunyai bobot strategis sehingga benar-benar membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang maju dan disegani oleh dunia internasional.

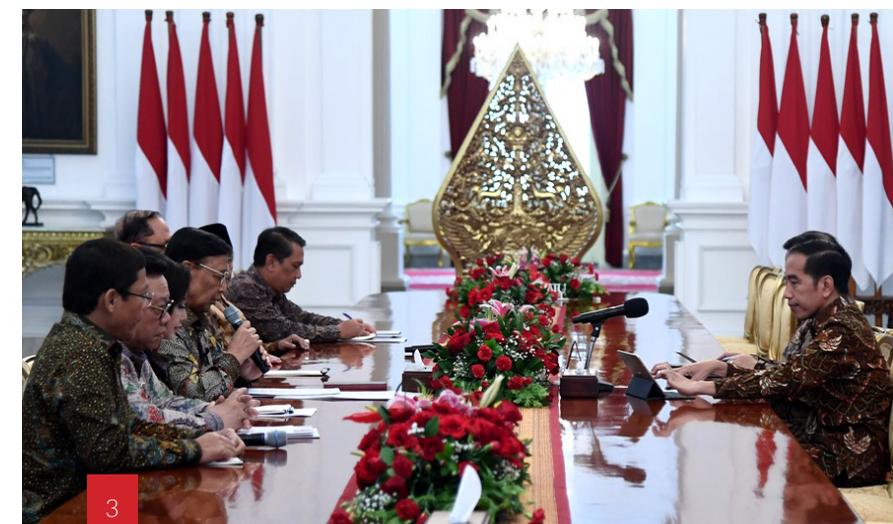
“Bangsa Indonesia harus bersatu dan berdaulat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Dengan perkembangan saat ini dan capaian kemajuan Indonesia, para ahli dunia pun meramalkan Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar”, ujarnya sebagai harapan Wantimpres yang pastinya merupakan harapan Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. (DKP)

foto : Andhi Ilham P.



Wiranto

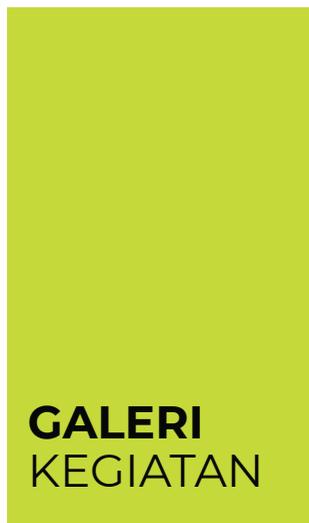
Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden



1. Ketua Wantimpres, Wiranto bersama lima orang Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani, Sidarto Danusubroto, Muhammad Luthfi Ali Yahya, Muhamad Mardiono dan Arifin Panigoro berkunjung ke kantor Redaksi Tempo di Palmerah Barat, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari 2020.
2. Ketua dan Anggota Wantimpres melakukan kunjungan kerja ke Universitas Gadjah Mada dan melakukan pertemuan dengan rektor dan jajaran Universitas Gadjah Mada. Pertemuan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2020, di Yogyakarta.
3. Wantimpres melakukan audiensi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka pada tanggal 22 Januari 2020.

4. Arifin Panigoro, Anggota Wantimpres menghadiri Pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Cimahi Techno Park, Cimahi pada tanggal 29 Januari 2019.
5. Ketua Wantimpres, Wiranto bersama Sidarto Danusubroto, dan Arifin Panigoro berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas di Palmerah Selatan, Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari 2020.
6. Ketua Wantimpres, Wiranto hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor pada tanggal 11 Februari 2020.

Foto : Septian, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Andytiyas



- 7. Dalam kunjungan kerja ke Selandia Baru pada tanggal 12 Februari 2020, Sidarto Danusubroto dan Putri Kus Wisnu Wardani, Anggota Wantimpres, melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pelaku industri termasuk UMKM.
- 8. Ketua Wantimpres, Wiranto dan Anggota Wantimpres, R. Agung Laksono bersama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mendampingi Presiden Joko Widodo menerima audiensi Wali Nangroe Aceh, Teuku Malik Mahmud Al Haytar di Istana Merdeka pada tanggal 13 Februari 2020.
- 9. Anggota Wantimpres, Muhammad Luthfi Ali Yahya menghadiri Dzikir dan Pengajian Kliwonan di Gedung Kanzus Sholawat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Februari 2020.

- 10. Anggota Wantimpres, R. Agung Laksono, meninjau pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karampuang, di Pulau Karampuang, Mamuju, Sulawesi Barat pada tanggal 8 Maret 2020.
- 11. Anggota Wantimpres Soekarwo, memberi kuliah umum untuk S1, S2 dan S3 fakultas ekonomi Unair pada 11 Maret 2020 mata kuliah : *E-Commerce di Indonesia : perkembangan dan peranannya dalam perekonomian* .
- 12. Anggota Wantimpres, Muhamad Mardiono, menghadiri Rapat Kerja Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (RAKERWIL ALFI) Provinsi Kalimantan Barat dan Seminar "Peran Logistik dalam Pembangunan Bangsa di Era Digital" di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Maret 2020.

WARTA

#edisi 1.2020

©WANTIMPRES 2020

